

POLICY BRIEF

Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Produksi Kakao



November 2020

Kertas Kebijakan tentang Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Produksi Kakao Berkelanjutan

Pembelajaran dari program *Equality for Sustainable Cocoa Production (ESCP)*

Pesan-Pesan Utama

- Kakao adalah tanaman penghasil uang utama dalam perekonomian pedesaan di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, di mana 97.29 % produsen adalah petani kecil yang bergantung pada kakao sebagai sumber pendapatan utama mereka (BPS 2018).
- Perempuan petani kecil terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan dalam produksi kakao, terutama dalam kegiatan panen dan paska panen. Selain itu, perempuan petani kakao dari berbagai latar belakang sosial juga terlibat aktif dalam pengaturan keuangan keluarga yang terkait erat dengan pengelolaan keuangan dalam proses produksi kakao.
- Perempuan lebih cenderung menggunakan praktik wanatani (*agroforestry*) atau praktik kebun campur secara polikultur (*poliyculture*) dalam pengelolaan kebun kakao dibandingkan laki-laki, karena menurut para perempuan praktik-praktik tersebut dapat membantu rumah tangga mereka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta kebutuhan pendapatan tambahan. Praktik-praktik tersebut juga memiliki kontribusi positif baik bagi lingkungan hidup maupun bagi pengembangan produksi kakao berkelanjutan.
- Terlepas dari keterlibatan aktif perempuan dalam produksi kakao, di wilayah-wilayah tertentu norma gender terkadang membatasi partisipasi perempuan dalam berbagai organisasi produsen kakao (termasuk kelompok tani dan koperasi) dan pelatihan, akses atas pengetahuan teknis dan informasi pasar, serta membatasi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan tentang rangkaian aktivitas produksi dan paska panen termasuk penjualan.
- Kesetaraan gender akan mendorong peningkatan produktivitas kakao dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Kesetaraan gender dalam produksi kakao akan menghilangkan hambatan perempuan dari berbagai kelompok sosial dalam mengakses pendidikan, peluang ekonomi, dan input produktif yang akan bermanfaat bagi pengembangan produksi kakao berkelanjutan.
- Upaya pengembangan produksi kakao secara berkelanjutan, setara gender dan inklusif harus mencakup tindakan khusus untuk memfasilitasi akses

perempuan terhadap dukungan teknis, pengetahuan teknis, informasi pasar, serta mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait rangkaian aktivitas produksi dan paska panen termasuk penjualan.

- Upaya peningkatan kesadaran laki-laki petani kakao agar dapat memberikan dukungan dalam kegiatan domestik di dalam rumah tangga dan upaya memperkuat suara perempuan petani kakao dalam pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga akan dapat meningkatkan praktik-praktik berkelanjutan dalam produksi kakao.

Latar Belakang

Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender memberikan mandat kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memimpin kementerian dan lembaga lain dalam mengembangkan kebijakan dan melaksanakan pengarusutamaan gender di setiap sektor pembangunan, termasuk pertanian. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia 2015–2019 secara eksplisit mengartikulasikan upaya menuju kesetaraan dalam prinsip-prinsipnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 mencatat bahwa sekitar 22,5 juta rumah tangga memiliki penghasilan utama di bidang pertanian, dimana 20 persennya adalah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Di antara rumah tangga yang terlibat dalam bidang pertanian adalah rumah tangga pengelola perkebunan kakao skala kecil. Perempuan terbukti memiliki peran sangat penting dalam pengelolaan perkebunan kakao skala kecil. Namun, peran perempuan dalam sektor ini belum memperoleh perhatian dari pengambil kebijakan serta pihak terkait lainnya.

Kertas kebijakan ini memberikan gambaran singkat tentang dimensi gender dan inklusi sosial dalam produksi kakao di Indonesia, kebijakan dan tindakan pengarusutamaan gender Indonesia yang sejalan dengan sektor pertanian, khususnya produksi kakao, serta tantangan dalam pengarusutamaan gender dan upaya inklusi sosial. Dokumen ini juga berisi rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut menuju pengarusutamaan strategis kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam kebijakan, kelembagaan dan tindakan menuju produksi kakao yang berkelanjutan, adil dan inklusif di Indonesia.

Gender dan Perkebunan Kakao

Kakao merupakan salah satu tanaman komersial penting yang menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil kakao terbesar keenam pada 2017/2018 (ICCO). Perkebunan kakao di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh petani kecil. Menurut data statistik kakao nasional (BPS 2018), 97,29 persen kebun kakao di Indonesia dikelola oleh petani kecil. Direktur pelaksana Program Pangan Dunia menyatakan bahwa pertanian skala kecil yang menyumbang 70 persen produksi pertanian memiliki wajah perempuan (FAO, 2010). Perempuan terlibat dalam semua kegiatan di sektor pertanian, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Meskipun menjadi tulang punggung salah satu sektor yang paling penting secara ekonomi di negara ini yakni sektor pertanian, perempuan sering terpinggirkan dan seringkali memiliki keterbatasan akses ke sumber daya keuangan, pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan hasil panen mereka dan meningkatkan mata pencaharian mereka (FAO, 2019).

Di masyarakat pedesaan Indonesia, kegiatan produksi pertanian dilakukan oleh unit keluarga. Namun demikian, perempuan seringkali tidak memiliki kendali atas sumber daya dan aset berharga seperti tanah, tenaga kerja dan teknologi baru (FAO, 2019). Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari norma gender yang mengatur posisi dan peran perempuan dan laki-laki serta memberikan pengaruh pada rangkaian relasi sosial yang melingkupi perempuan dan laki-laki.

Perempuan memainkan peran penting dalam perkebunan kakao skala kecil. Menurut Eissler (2019) yang melakukan penelitian tentang perkebunan kakao skala kecil di Lampung dan Sulawesi Selatan, perempuan menyumbangkan sejumlah besar tenaga kerja fisik untuk produksi kakao skala kecil dari aktivitas tenaga kerja tidak dibayar dan dibayar. Eissler (2019) menemukan bahwa meskipun kebun kakao termasuk dalam domain laki-laki, perempuan menyumbangkan tenaga kerja yang cukup besar bagi produksi kakao. Perempuan memberikan kontribusi pada semua aspek produksi kakao dalam bentuk tenaga kerja tidak dibayar di mana perempuan bertugas memisahkan biji, menentukan kualitas setiap biji (memisahkan mana yang harus dijual ke pasar lokal dan mana yang kepada pembeli yang lebih berkualitas), pengeringan biji (jika dikeringkan), dan negosiasi harga. Di beberapa wilayah tertentu, karena panen terus menurun dan semakin banyak suami bermigrasi untuk mencari peluang kerja musiman atau sesekali, perempuan memikul tanggung jawab tambahan khususnya untuk pemeliharaan dan pemeliharaan kebun kakao di atas tugas rumah tangga sehari-hari dan kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan. Hal ini memberikan beban yang berlebihan bagi perempuan (Eissler, 2019).

Eissler (2019) juga mencatat bahwa sebagian besar perempuan yang dia wawancarai untuk penelitiannya menunjukkan bahwa mereka merasa diri mereka bukan petani. Situasi ini mencerminkan kurangnya kepercayaan diri perempuan terhadap

pengetahuan dan keahlian mereka dalam perkebunan kakao skala kecil. Namun, setelah wawancara selama satu hingga dua jam, para perempuan ini akan menunjukkan pengetahuan mereka tentang produksi kakao, pengendalian kualitas, dan identifikasi penyakit secara mendetail. Eissler (2019) berpendapat bahwa situasi ini menunjukkan kurangnya kepercayaan pada keahlian mereka sendiri dalam produksi kakao yang terkait erat dengan norma gender yang ditetapkan (di mana perempuan tidak terlatih untuk mengartikulasikan pengetahuannya dan pendapatnya). Namun demikian, terdapat sebagian perempuan anggota kelompok tani yang menunjukkan bahwa mereka sendiri juga memiliki pengetahuan tentang kakao dan produksi tanaman lainnya dan akan berkontribusi dalam pengambilan keputusan rumah tangga seputar kegiatan pertanian tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pelatihan dan kegiatan kelompok tani dapat meningkatkan kepercayaan diri perempuan dan memperkuat pengetahuan mereka terkait bidang pertanian.

Rangkaian diskusi kelompok terfokus yang dilaksanakan Swisscontact pada tahun 2017, khususnya dalam kegiatan *Social and Gender Integration Plan* yang merupakan bagian dari program *Green Prosperity Sustainable Cocoa Production Plan*, memberikan informasi bahwa kebanyakan pekerjaan rumah tangga di kalangan keluarga petani kakao adalah tanggung jawab perempuan terlepas dari latar belakang pendidikannya. Akibatnya, perempuan memiliki waktu terbatas untuk bekerja di kebun serta berpartisipasi dalam pelatihan. Namun demikian, perempuan memainkan peran penting dalam kegiatan pemanenan kakao dan pengelolaan keuangan dari hasil panen. Terungkap pula bahwa perempuan petani kakao memiliki pengetahuan yang terbatas tentang cara memangkas dengan benar dan tidak memiliki akses yang sama untuk mengikuti pelatihan padahal sebenarnya 50% pekerjaan pemangkasan dilakukan oleh perempuan di daerah tertentu seperti di Gorontalo. Selain itu, kajian yang dilakukan oleh tim Swisscontact serta data dari berbagai kegiatan pemantauan di lapangan juga menunjukkan bahwa perempuan berperan positif dalam mendorong suami mereka menerapkan praktek pertanian yang baik. Meskipun laki-laki memegang keputusan akhir di sebagian besar proses pengambilan keputusan di dalam rumah tangga di wilayah-wilayah tertentu, perempuan juga memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan partisipasi, akses dan kontrol perempuan terhadap peningkatan kapasitas.

Keterlibatan aktif perempuan dan kesetaraan peran dan posisi dalam produksi kakao memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan kakao berkelanjutan. Dalam kumpulan kisah sukses petani kakao yang dirangkai oleh Swisscontact (2017), terdapat kisah salah satu perempuan petani kakao di Sumatra Barat bernama Novalinda yang mampu meningkatkan produksi kakao hingga 2.6 kg. per phon dari kebun kakao yang ia kelola bersama suaminya, setelah ia mengikuti Sekolah Lapang untuk petani selama 10 hari yang diselenggarakan oleh Barry Callebaut dan Swisscontact. Novalinda membagi pengetahuan yang ia peroleh dari pelatihan tersebut kepada

suaminya. Novalinda dan suaminya (bernama Jamaan) berbagi tugas dalam mengerjakan kebun mereka. Jamaan fokus untuk memelihara kebun dengan standar yang tinggi, dibantu oleh dua orang pekerja pada saat pemupukan dan musim panen. Novalinda bertanggung jawab untuk penanganan paska panen seperti fermentasi sampai penjualan biji kakao kepada pembeli berikutnya di rantai nilai. Banyak petani lain datang ke kebun mereka untuk meminta saran dan entris dengan gratis agar mereka juga dapat memperbaiki kebun mereka. Keberhasilan Novalinda tidak hanya memberikan manfaat untuk keluarganya, tapi juga bermanfaat untuk komunitas kakao disekitarnya (Swisscontact, 2017).

Partisipasi perempuan dalam produksi kakao juga memberikan kontribusi positif pengelolaan lahan kebun kakao secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengolahan data petani di wilayah kerja SCPP di Sumatra Barat dan di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Luwu Timur, di mana perkebunan kakao di Sumbar lebih memiliki keseimbangan gender (41% petani perempuan : 59% petani laki-laki), ditemukan bahwa kebun kakao di Sumbar relatif lebih memiliki keragaman tanaman (polikultur) dibandingkan wilayah lain yang tidak memiliki keseimbangan jumlah petani perempuan dan laki-laki seperti di Kabupaten Luwu Timur. Hal tersebut dihitung dengan menggunakan data variable “proporsi pohon pelindung atau tanaman lain di satu lahan kakao” di mana hasilnya menunjukkan Sumbar memiliki proporsi yang lebih tinggi yaitu 14% dibandingkan Luwu Timur 7%. Analisis ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dan polikultur memiliki hubungan positif.

Dalam penelitian yang dilakukan di Ekuador, Ilmuwan ICRAF (Blare dan Useche 2015, 2019) mengamati bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persepsi berbeda serta menempatkan nilai berbeda pada jasa ekosistem yang disediakan oleh sistem wanatani, yang mempengaruhi preferensi penggunaan lahan mereka dan penerapan praktik pertanian, termasuk apakah akan menanam kakao secara monokultur atau dengan menggunakan praktik wanatani. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perempuan lebih menghargai wanatani kakao daripada laki-laki dan lebih cenderung menyukai praktik wanatani dibandingkan dengan praktik monokultur. Meski monokultur memberikan insentif ekonomi yang lebih cepat dan lebih besar - karakteristik yang lebih penting bagi laki-laki – wanatani kakao lebih berkelanjutan dan menghasilkan tambahan sumber pangan dari tanaman lain yang ditanam dalam praktik wanatani, yang menurut perempuan sangat penting. Karena perbedaan berbasis gender inilah, jika perempuan dimasukkan dalam pengambilan keputusan kemungkinan besar akan mengarah pada penggunaan lahan yang akan memberikan hasil yang berbeda. Namun demikian, dalam realitanya peran dan relasi sosial berbasis gender sering kali membatasi suara perempuan dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan lahan.

Pengarusutamaan Gender di Sektor Pertanian di Indonesia

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

Sektor pertanian hingga saat ini masih menjadi tumpuan hidup sebagian masyarakat, terutama di pedesaan. Namun produktivitas sektor pertanian masih relatif rendah, karena selain faktor teknik produksi dan ekonomi, terdapat pula faktor sosial budaya masyarakat yang dalam situasi tertentu menjadi penghambat perkembangan sektor pertanian secara optimal. Salah satu permasalahan sosial budaya yang dihadapi sektor pertanian di lapangan adalah belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses produksi, baik di on-farm maupun off-farm.

Selain itu, saat ini banyak generasi muda yang tidak tertarik lagi kepada pertanian. Di sisi lain, banyak kegiatan dan peluang usaha pertanian yang sesuai bagi perempuan tani, namun belum dapat dimanfaatkan dengan baik, seperti kegiatan pasca panen, pengolahan hasil skala rumah tangga, pemasaran produk, pengelolaan lembaga keuangan mikro di pedesaan serta kegiatan bernilai tambah tinggi lainnya.

Berdasarkan kondisi diatas, maka Kementerian/Lembaga (K/L) dan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang terkait erat dengan pertanian perlu mendorong peran serta setiap pelaku pembangunan pertanian (perempuan, laki-laki, tua maupun muda) dalam proses pengambilan keputusan untuk bekerja atau berusaha di bidang pertanian. Melalui proses peran serta ini diharapkan aspirasi, kebutuhan, pengalaman, dan permasalahan yang dihadapi di lapangan dapat terakomodasi dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.

Konsep gender dan pengarusutamaan gender telah cukup lama dikembangkan di lingkungan Kementerian Pertanian. Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian Pertanian telah dibentuk dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Pertanian pada tahun 2011. Sebagai tindak lanjutnya, sudah diterbitkan beberapa dokumen yaitu : Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pertanian dan Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender Dalam Rencana Aksi Pembangunan Pertanian. Namun sejauh ini belum terdapat dokumen khusus terkait pengarusutamaan gender dalam pembangunan perkebunan kakao di Indonesia.

Program *Equality for Sustainable Cocoa Production* (ESCP) dan Metode *Gender Action Learning System* (GALS): Catatan Pembelajaran

Equality for Sustainable Cocoa Production (ESCP) adalah program kerjasama antara *Cocoa Sustainability Partnership* (CSP) dengan Swisscontact yang didanai oleh Stichting Rainforest Alliance. Proyek ESCP mengasumsikan bahwa kesetaraan gender meningkatkan efisiensi ekonomi dan meningkatkan hasil pembangunan, termasuk di dalamnya peningkatan produktivitas. Kesetaraan gender akan menghilangkan hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pendidikan, peluang ekonomi, dan input produktif. Kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk menjadi aktif secara sosial dan politik, akan membangun rangkaian proses yang lebih baik menuju terwujudnya pembangunan (World Bank, 2011). Dan Mengikuti asumsi ini, tujuan utama ESCP adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga petani kakao skala kecil dan mengembangkan sektor kakao yang kompetitif di Indonesia.

GALS (*Gender Action Learning System*) adalah metodologi pemberdayaan berbasis komunitas yang menggunakan prinsip-prinsip inklusi untuk meningkatkan pendapatan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat rentan dengan cara yang setara gender. Pendekatan ini memosisikan perempuan dan laki-laki miskin sebagai pendorong proses pembangunan yang dimulai dari diri mereka sendiri, mengidentifikasi dan membongkar hambatan di lingkungan mereka, dan mendorong mereka untuk membangun posisi tawar dengan penyedia layanan dan aktor swasta. Pendekatan ini terbukti efektif untuk mengubah ketidaksetaraan gender yang telah ada dari generasi ke generasi, memperkuat kekuatan negosiasi pihak yang terpinggirkan dan mendorong kolaborasi, kesetaraan, dan rasa hormat di antara para pelaku dalam rantai nilai kakao.

ESCP mengadopsi GALS dan melaksanakan proses belajar bersama dengan pendekatan tersebut. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan laki-laki petani kakao dalam peningkatan penghidupan, keseimbangan relasi gender dan penguatan kelompok tani, baik itu di tingkat individu/agensi, relasi dalam rumah tangga dan dalam kelompok serta komunitas serta di tingkat struktural. Metode GALS yang diterapkan dalam ESCP pada dasarnya terdiri dari 3 fase besar, setiap fase umumnya dilakukan kurang lebih 1 tahun. Dalam setiap fase ada beberapa kegiatan utamanya. Tiga fase dalam GALS adalah: Fase Katalis, Fase Pengarusutamaan dan Fase Gerakan Keadilan Gender. Setiap fase ini saling berkaitan dan berkelanjutan, bukan sesuatu yang linear dan terpisah (Darmawati dan Hastarini, 2020).

Peserta proses belajar bersama dengan metode GALS adalah para petani kakao '*champion*' dari wilayah-wilayah dampingan ESCP sebanyak 21 orang, di mana 10

orang (48%) adalah perempuan. Para petani kakao '*champion*' ini berasal dari 18 rumah tangga dan telah berpartisipasi dalam proses belajar bersama dengan metode GALS sejak awal. Mereka juga telah mendiseminasikan pengetahuan terkait GALS kepada 286 petani lain, yang di dalamnya terdapat 115 petani lapis pertama di mana 57 % di antaranya adalah perempuan. Proses belajar dengan metode GALS ini didominasi oleh petani yang berada dalam kelompok usia 41 – 50 tahun. Hasil kajian dampak program yang dilakukan oleh ESCP menunjukkan bahwa sebagai tindak lanjut dari keterlibatan mereka dalam GALS, para petani '*champion*' dan keluarganya melakukan perbaikan praktik pertanian yang baik dan beberapa perubahan sebagai berikut (Hafid, 2020):

- Semua petani kakao '*champion*' telah mengadopsi 7 praktik pertanian yang baik yang direkomendasikan yaitu pemupukan, sanitasi, penanaman kembali, pemangkasan, penanaman pohon pelindung, pengendalian penyakit hama, dan pemanenan.
- Sebagian besar petani *champion* (71%) telah menanam kakao dengan sistem tumpang sari di mana tanaman lain dijadikan sumber pendapatan tambahan.
- Hampir semua petani *champion* (90%) yang terdiri dari 8 perempuan dan 11 laki-laki telah memfasilitasi lokakarya kecil atau pelatihan individu dalam kelompok / komunitas mereka untuk mendiseminasikan GALS kepada 268 petani lain.
- Enam puluh tujuh petani dari 6 kelompok tani kakao telah aktif dalam kegiatan agribisnis sebagai bagian dari rencana aksi untuk mendapatkan penghasilan tambahan seperti pembuatan kompos dan kebun sayur.

Ringkasan data yang lebih lengkap tersedia di Lampiran 1 naskah ini. Rangkaian data hasil kajian dampak pendekatan GALS yang diterapkan oleh ESCP tersebut menggambarkan peningkatan persepsi dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan pertanian, kemajuan dalam penyusunan rencana aksi dan dalam berbagi tugas dan usaha di tingkat rumah tangga untuk meningkatkan penghasilan, upaya untuk mengelola keuangan biaya, dan mengelola tetap tambahan aset. Terdapat pula perubahan dalam pengelolaan/manajemen pertanian dan dalam pengelolaan sumberdaya di tingkat rumah tangga. Para petani perempuan dan laki-laki *champion* dan yang masuk dalam petani lapisan pertama mulai melakukan perubahan terkait dengan peran gender di ranah rumah tangga. Perubahan ini dapat menjadi cikal bakal bagi terbukanya ruang partisipasi yang lebih besar bagi perempuan dan generasi muda.

Selain perubahan di tingkat petani penerima manfaat program, perubahan juga terjadi di staff tim kerja inti Swisscontact dan beberapa organisasi pendukung yang terlibat. Perubahan ini ada di tingkat individual, relasi gender dalam rumah tangga dan juga ketrampilan mereka dalam memfasilitasi dan menggunakan alat-alat GALS.

Mewujudkan Produksi Kakao yang Setara Gender, Inklusif dan Berkelanjutan

Perempuan adalah aktor penting dalam produksi kakao dan mereka menunjukkan minat yang kuat untuk berpartisipasi dalam produksi kakao dan komersialisasi. Namun, mereka sering dianggap sebagai pemain sekunder. Walau mereka terlibat dalam berbagai aspek produksi, mereka sering ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan tentang aset dan akses ke pasar. Selain itu, peran gender tradisional sering membatasi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan dan produksi lahan, dan membatasi mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan kapasitas.

Meningkatkan partisipasi perempuan dari berbagai kelompok sosial merupakan satu langkah yang sangat penting untuk intensifikasi produksi dan praktik-praktik berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan pada fakta di beberapa tempat di mana perempuan lebih cenderung menggunakan praktik wanatani atau praktik kebun campur secara polikultur dalam pengelolaan kebun kakao dibandingkan laki-laki, Praktik-praktik tersebut selain memberikan kontribusi positif baik pengembangan produksi kakao berkelanjutan.

Kebijakan dan program yang mempromosikan intensifikasi produksi kakao harus secara khusus memasukkan perempuan dalam pelatihan dan kegiatan penyuluhan. Dukungan khusus bagi perempuan perlu diberikan, antara lain melalui: a) pendekatan penyuluhan yang memberikan ruang bagi para petani perempuan petani untuk berinteraksi secara langsung dengan pelatih dan penyuluh; b) pengenalan teknologi informasi untuk berbagi informasi agronomi dan harga; c) membuat pelatih, penyuluh atau teknisi lain peka terhadap pentingnya menanggapi kebutuhan khusus perempuan.

Selain itu, penting untuk membahas budaya dan norma gender yang membatasi akses perempuan atas informasi. Perlu dilakukan dialog yang melibatkan perempuan dan laki-laki dalam membahas bagaimana norma-norma gender dalam konteks tertentu menciptakan ketidakadilan gender yang membatasi rumah tangga petani kakao dalam memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya produktif mereka.

Pemberdayaan perempuan melalui pengaturan hak atas sumberdaya, memfasilitasi akses pendidikan dan kesempatan kerja akan mendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender, sekaligus mendorong rumah tangga petani kecil mengadopsi praktik pengelolaan kakao yang berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan

- **Pengakuan tentang peran perempuan dari berbagai kelompok sosial dalam proses produksi kakao;** diperlukan pengakuan formal atas peran perempuan dalam produksi kakao, serta dukungan dan insentif yang lebih baik untuk perempuan. Pengakuan serta dukungan dan insentif bagi perempuan petani kakao perlu dituangkan dalam kebijakan dan program pemerintah.
- Hak perempuan atas tanah; diperlukan implementasi lebih baik dari peraturan pemerintah tentang hak perempuan atas tanah, yang seringkali tidak diperhatikan. Diperlukan dukungan kebijakan dan program untuk diseminasi informasi dan pelatihan yang lebih baik tentang hak legal perempuan atas tanah.
- **Perempuan dan organisasi produsen kakao skala kecil;** perempuan membutuhkan akses yang lebih baik ke kelompok tani dan atau organisasi tempat produsen kakao skala kecil lainnya, terlepas dari status kepemilikan lahan (misalnya keanggotaan bersama dengan pasangan atau anggota keluarga laki-laki lainnya). Diperlukan dukungan kebijakan dan program untuk memfasilitasi akses, partisipasi dan kontrol perempuan terhadap kelompok tani, organisasi produsen kakao skala kecil lainnya dan organisasi pendukung seperti koperasi dan lain-lain.
- **Pelatihan dan penyuluhan terkait produksi kakao dengan perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial;** Sesi pelatihan dan penyuluhan harus terbuka bagi semua pihak yang terlibat dalam produksi kakao (baik pemilik kebun maupun tenaga kerja yang merupakan anggota keluarga). Perlu dipastikan agar perempuan laki-laki serta generasi muda dari berbagai latar belakang sosial serta kelompok penyandang disabilitas dapat berpartisipasi. Pelatihan dan penyuluhan juga perlu mengakomodir kebutuhan khusus perempuan dari kelompok sosial tertentu (antara lain perempuan kepala keluarga atau perempuan yang sedang menjalani fungsi reproduksi). Dibutuhkan lebih banyak pelatih dan penyuluh perempuan, serta pelatihan kepekaan gender bagi pelatih dan penyuluh laki-laki. Diperlukan dukungan kebijakan dan program pemerintah bagi pengembangan pelatihan dan penyuluhan terkait produksi kakao dengan perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial.
- **Tata kelola publik;** Kementerian Pertanian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Desa dan Wilayah Terpencil serta seluruh pihak terkait perlu membangun upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam produksi kakao. Dibutuhkan saluran bagi petani kakao skala kecil, khususnya bagi perempuan dan generasi muda petani kakao, untuk memberikan masukan ke dalam perumusan kebijakan kabupaten dan nasional.

- **Adopsi metode Sistem Pembelajaran Berbasis Aksi Gender (Gender Action Learning System/GALS);** Metode GALS memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan laki-laki petani kakao dalam peningkatan penghidupan, keseimbangan relasi gender dan penguatan kelompok tani. Proses pemberdayaan melalui pembelajaran berbasis aksi dengan perspektif kesetaraan gender dilaksanakan di tingkat individu, rumah tangga, kelompok dan komunitas, serta di berbagai tingkatan yang bersifat struktural. Metode ini dapat dipertimbangkan untuk diadopsi oleh pemerintah untuk menjadi bagian dari proses pendampingan dan pemberdayaan petani kakao.
- **Menghubungkan dukungan komersial dan sosial;** Perempuan dan laki-laki petani kakao dari berbagai kelompok sosial serta generasi muda yang terlibat dalam pertanian kakao perlu memetik hasil yang lebih baik atas kerja keras mereka dalam rangkaian kegiatan produksi kakao dan berbagai kegiatan paska produksi. Perlu dilakukan upaya untuk menghubungkan dukungan komersial dan sosial dari berbagai pihak yang mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai ditinjau dari dimensi gender dan berbagai dimensi sosial lainnya. Dengan demikian perempuan dan laki-laki petani kakao dari berbagai kelompok sosial serta generasi muda dapat meningkatkan pengembangan produksi kakao secara berkelanjutan.
- **Kesetaraan gender, praktik-praktik produksi kakao yang lebih ramah lingkungan, ketahanan pangan, diversifikasi pendapatan keluarga, dan pengembangan produksi kakao berkelanjutan.** Di wilayah-wilayah tertentu, perempuan petani kakao dan keluarganya mengembangkan praktik-praktik wanatani dan atau praktik-praktik kebun campur secara polikultur dalam pengelolaan kebun kakao. Diperlukan dukungan penelitian dan pengembangan program percontohan untuk penelusuran lebih lanjut tentang keterkaitan antara kesetaraan gender di tingkat keluarga dengan praktik-praktik produksi kakao ramah lingkungan yang mendukung ketahanan pangan dan diversifikasi pendapatan keluarga, serta mendorong pengembangan pengembangan produksi kakao berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Blare, T. and Useche, P. (2019). Differences in women's and men's adoption of cacao agroforests in coastal Ecuador. *Environmental Conservation*.
- Blare, T. and Useche, P. (2015). Is there a choice? Choice experiment to determine the value men and women place on cacao agroforests in coastal Ecuador. *International Forestry Review Vol.17(S4), 2015*.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Kakao Indonesia 2018. Jakarta: BPS.
- Darmawati, I. dan Hastarini, D. (2020). Protokol Penerapan Metode GALs Fase 1 dalam Rantai Nilai Kakao. Dokumen internal, tidak dipublikasikan (unpublished document).
- Equality for Sustainable Cocoa Production (ESCP). 2020. ESCP 2nd Semester Report: Transforming Vision into Action. Dokumen internal, tidak dipublikasikan (unpublished document).
- Eissler, S. (2019). Chocolate and Climate Change: Investigating Gender Dynamics of Small-Scale Cacao Producers in Lampung and South Sulawesi Indonesia. A Dissertation in Rural Sociology and Human Dimensions of Natural Resources and the Environment. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Food and Agriculture Organization. (2019). Country Gender Assessment of Agriculture and the Rural Sector in Indonesia. Rome: FAO.
- Hafid, H. (2020). Draft Document of Impact Assessment Report: Equality for Sustainable Cocoa Production (ESCP). Dokumen internal, tidak dipublikasikan (unpublished document).
- Swisscontact. (2017). Kisah Sukses: Berkontribusi pada Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Program Produksi Kakao Berkelanjutan. Jakarta: Swisscontact.
- Swisscontact. (2017). Social and Gender Integration Plan, Green Prosperity Sustainable Cocoa Production Plan, Swisscontact. Dokumen internal, tidak dipublikasikan (unpublished document).
- World Bank. (2012). World Development Report 2012: Gender Equality and Development. Washington DC: World Bank.

Lampiran 1. Tindak lanjut dari keterlibatan petani kakao dalam GALS

Perbaikan Praktik Pertanian & Perubahan Perilaku di Tingkat Petani 'Champion' dan Petani Lapis Pertama:

- Semua petani kakao '*champion*' telah mengadopsi 7 praktik pertanian yang baik yang direkomendasikan yaitu pemupukan, sanitasi, penanaman kembali, pemangkasan, penanaman pohon pelindung, pengendalian penyakit hama, dan pemanenan.
- Sepertiga *champion* (33%) telah meningkatkan produksi kakao dengan penanaman kembali dan perluasan kebun kakaonya.
- Sebagian besar petani *champion* (71%) telah menanam kakao dengan sistem tumpang sari di mana tanaman lain dijadikan sumber pendapatan tambahan.
- Dari periode review 3 bulan sampai 9 bulan, jumlah *champion* yang mengadopsi tumpang sari meningkat lebih dari dua kali lipat (150%).
- Pohon pelindung yang paling banyak ditanam adalah pohon buah-buahan seperti durian dan langsung (*Lansium parasiticum*) diikuti oleh jenis pohon kayu seperti Bitti (*Vitex cofassus*).
- Partisipasi dalam GALS telah mendorong 43% *champion* untuk berupaya meningkatkan pendapatan keluarga.
- Semua rumah tangga sudah mulai mengelola arus kas keluarga dengan mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari yang berlebihan atau mengganti beberapa konsumsi dengan pilihan yang lebih murah.
- Dalam pembelanjaan pertanian kakao, 15 *champion* (83%) telah memproduksi pupuk kompos sendiri dan beberapa dari mereka mengganti pestisida dengan Pengendalian Hama Terpadu.
- Lebih dari separuh keluarga *champion* telah mengurangi biaya untuk gaya hidup yang tidak perlu seperti rokok, judi, dan tempat nongkrong dengan pengurangan sekitar 55% (dari Rp 422.857 menjadi Rp 191.571).
- Seluruh rumah tangga petani '*champion*' dan petani lapis pertama telah berhasil membujuk anggota rumah tangganya untuk berkontribusi dalam kegiatan pertanian kakao.
- Terdapat 132 kebun kakao yang sudah dikelola lebih baik.
- Terdapat 65 rumah tangga yang telah memelihara pencatatan keuangan dengan menghemat pendapatan dan mengurangi biaya.
- Terdapat 52 sumber pendapatan alternatif yaitu 5 sumber dari sektor kakao, 35 dari sektor pertanian, 5 dari peternakan, 3 dari UMKM, 2 dari sektor publik, 1 dari transportasi dan 1 dari konstruksi.
- Tanaman paling populer yang dijadikan sumber pendapatan pertanian tambahan adalah pohon buah-buahan seperti durian, langsung, & pisang. Selain itu, sebagian petani *champion* dan petani lapis pertama juga menanam rambutan, kelapa, pepaya, serta beberapa jenis sayuran dan buah lainnya.

Pemberdayaan Sosial:

- Hampir semua petani *champion* (90%) yang terdiri dari 8 perempuan dan 11 laki-laki telah memfasilitasi lokakarya kecil atau pelatihan individu dalam kelompok / komunitas mereka untuk mendiseminasikan GALS kepada 268 petani lain.
- Empat belas petani *champion* (7 perempuan & 7 laki-laki) telah berbagai pengetahuan yang mereka peroleh melalui GALS dan berhasil memengaruhi 115 petani lain untuk menerapkan fitur GALS.
- Sebagian besar petani (77%) telah menerapkan set lengkap konsep GALS yang terdiri dari 4 alat utama dan 2 alat pelengkap.
- Terdapat 123 petani (91%) yang perjalanan visinya berfokus pada peningkatan usaha tani kakao terlepas dari adanya tanaman lain atau kegiatan lain sebagai sumber penghidupan tambahan.

Diversifikasi Sumber Penghidupan

- Enam puluh tujuh petani dari 6 kelompok tani kakao telah aktif dalam kegiatan agribisnis sebagai bagian dari rencana aksi untuk mendapatkan penghasilan tambahan seperti pembuatan kompos dan kebun sayur.
- Terdapat kegiatan agribisnis lain di mana 37 petani dilatih beternak kambing dan 18 petani dilatih dalam pengembangan pembibitan kakao.
- Tiga puluh sembilan petani (58%) telah merencanakan beberapa kegiatan untuk praktik agribisnis yang mereka gambarkan dalam GALS.

Lampiran 2.

Kebijakan tentang Kesetaraan Gender dan Pengarusutamaan Gender di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara khusus membedakan warga negara antara warga negara perempuan dan laki-laki, namun memiliki semangat kesetaraan. Konstitusi juga merujuk sebagai salah satu landasan hukum dasar hak-hak perempuan di Indonesia. Pasal 27 (1) menyatakan bahwa "Semua warga negara harus sederajat di hadapan hukum dan pemerintah dan harus menghormati hukum dan pemerintah, tanpa pengecualian." Pasal 27 (2) menyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang manusiawi."

Indonesia telah menandatangani Konvensi 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan meratifikasinya pada tahun 1984. Artinya, Indonesia harus melaksanakan Pasal 14 CEDAW, yang menyatakan bahwa "Negara Pihak harus mengambil semua yang sesuai. langkah-langkah untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan dan... harus memastikan kepada perempuan tersebut hak... untuk memiliki akses ke... dan perlakuan yang sama dalam reformasi tanah dan agraria serta dalam skema pemukiman kembali. "

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Selain itu, kesetaraan gender dapat dicapai dengan melakukan pemberdayaan perempuan serta rangkaian langkah afirmasi bagi perempuan dari berbagai kelompok sosial termasuk kelompok rentan yang dalam berbagai situasi berada dalam keadaan tertinggal jauh akibat tingginya kesenjangan gender dan berbagai bentuk kesenjangan lainnya. Dengan demikian, PUG dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Mandat untuk melaksanakan PUG oleh semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Nasional. Mandat tersebut diperkuat melalui Undang-Undang (UU) No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak periode 2004-2009 hingga periode 2019-2024.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012 diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa juga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan dan pemerintahan desa. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 Pasal 121 Ayat 1 (sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 6/2014) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender. Bahkan Badan Kerjasama Antar-Desa harus mempertimbangkan keadilan gender dalam keanggotaan dari tokoh masyarakat desa.

Kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025, dihadang serangkaian masalah dan tantangan. Permasalahan besar yang dihadapi dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yaitu masih terdapatnya kesenjangan gender di berbagai bidang serta masih terus terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan.

We create opportunities

Swisscontact Indonesia Country Office
The VIDA Building 5th Floor Unit 07-09
Jl. Raya Perjuangan, No. 8 Kebon Jeruk 11530
West Jakarta | Indonesia
Phone +62-21-2951-0200

Publishing Information
Layout and texts: Swisscontact
Photos: Swisscontact

Swiss NPO-Code: The structure and management of Swisscontact conforms to the Corporate Governance Regulations for Non-Profit Organisations in Switzerland (Swiss NPO-Code) issued by the presidents of large relief organisations. An audit conducted of behalf of the organization showed that the principles of the Swiss NPO-Code are adhered to.

ZEWO-Seal of approval: Swisscontact was awarded the Seal of Approval from ZEWO. It is awarded to non-profit organisations for the conscientious handling of money entrusted to them, proves appropriate, economical, and effective allocation of donations and stands for transparent and trustworthy organisations with functioning control structures that uphold ethics in the procurement of funds and communication. Swisscontact is regularly audited on the adherence to these criteria. (Source: ZEWO) Societe Generale de Surveillance (SGS): Swisscontact has been awarded the Certificate of the International Inspection Agency Societe Generale de Surveillance (SGS) within the NGO Benchmarking Program.

2021



 Swisscontact Indonesia

 www.swisscontact.org/indonesia

 id.info@swisscontact.org

